

Dalam Bayangan: “Mei 1998”

Muhammad Maulid Aufa Putra Sujana¹ Arwyn Muhammad Sya'bani² Syauqi Al-Harits Gymnastiar³ Aliyatun Nur Afifah⁴ Dadi Mulyadi Nugraha⁵

Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia⁵

Email: maulidpe06@gmail.com¹ arwynsya26@upi.edu² syaalgy03@gmail.com³ alyanurafifah1327@upi.edu⁴ dadimulyadi301190@upi.edu⁵

Abstrak

Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia mengakibatkan luka sejarah. Solusi pencegahan termasuk asimilasi budaya, multikulturalisme, dan kesetaraan ekonomi. Peran ABRI, pemerintah, dan organisasi kunci dalam menangani kerusuhan. Prasangka dan ketidaksetaraan memicu konflik. Solusi kompleks melibatkan pemerintah dan masyarakat. Asimilasi yang inklusif dan transparansi etnis Tionghoa penting. Solidaritas sosial dan netralitas pemerintah diperlukan. Tragedi Mei 1998 menjadi pembelajaran akan pentingnya harmoni antar-etnis dan stabilitas negara.

Kata Kunci: Kerusuhan Mei 1998, Etnis Tionghoa, Pencegahan Konflik, Asimilasi Budaya, Peran Pemerintah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 telah menjadi poin tragis dalam sejarah modern negara ini. Tidak hanya menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, tetapi juga meninggalkan dampak yang mendalam di berbagai bidang. Kejadian ini memiliki akar sejarah yang meruncing pada konflik antara kelompok etnis di Surakarta pada tahun 1972, ketika konflik antara penduduk Arab dan tukang becak meledak menjadi kerusuhan yang mempengaruhi masyarakat kelas bawah. Serangkaian peristiwa serupa, seperti kerusuhan pada tahun 1980 setelah pertikaian antara remaja Tionghoa dan mahasiswa Jawa, semakin memperparah situasi. Tinjauan literatur dari artikel-artikel terkini dalam sepuluh tahun terakhir menyoroti aspek penting dari peristiwa ini. Meskipun telah ada sejumlah penelitian yang menggali akar konflik dan dampaknya, masih ada celah dalam pemahaman kita. Tinjauan yang lebih dalam mengenai perbedaan unik antara kerusuhan sebelumnya, terutama dalam hal orisinalitas dan kontribusi ilmiah, diperlukan untuk memperkuat pemahaman akan signifikansi peristiwa ini. Pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa kerusuhan ini dan perbedaan signifikan dari kerusuhan sebelumnya menjadi kunci untuk mengisi kesenjangan dalam pengetahuan. Di sinilah pentingnya penelitian ini; untuk menghadirkan perspektif baru dan menyediakan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada konflik etnis serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan dasar pemahaman atas gap dalam pengetahuan yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi aspek-aspek krusial dari kerusuhan Mei 1998 dengan fokus pada dinamika konflik etnis, faktor-faktor pemicu, dan dampaknya terhadap masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi pemahaman dan penanganan konflik etnis di masa depan.

METODE PENELITIAN

Rangkaian metode yang digunakan dalam jurnal ini mencakup pendekatan kualitatif dengan metode kajian artikel konseptual. Berikut adalah penjelasan mengenai metode kajian artikel konseptual yang digunakan dalam artikel tersebut:

1. Penyusunan Rumusan Masalah dan Tujuan: Peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti, seperti penyebab kerusuhan Mei 1998 di Indonesia dan dampaknya. Tujuan penelitian juga dirumuskan, seperti memahami akar penyebab, menganalisis peran aktor, dan mengevaluasi respons pemerintah.
2. Pendefinisian Konsep: Penelitian konseptual melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian, seperti kerusuhan, ketidaksetaraan ekonomi, identitas etnis, dan asimilasi budaya. Konsep-konsep ini dianalisis dan diuraikan secara teoritis.
3. Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menganalisis konsep-konsep yang relevan dan mengaitkannya dengan konteks kerusuhan Mei 1998. Analisis ini melibatkan interpretasi, sintesis, dan pemahaman mendalam terhadap teori-teori yang ada.
4. Pengembangan Argumen: Berdasarkan analisis data dan literatur, peneliti mengembangkan argumen-argumen yang mendukung temuan-temuan dalam penelitian ini. Argumen-argumen ini memperkuat kesimpulan dan simpulan yang diambil dari penelitian.
5. Penyusunan Kesimpulan dan Implikasi: Peneliti menyusun kesimpulan dari temuan-temuan yang didapatkan melalui analisis konseptual. Kesimpulan ini menggambarkan jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga mencatat implikasi dari temuan-temuan tersebut, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun kebijakan publik.

Dengan menggunakan metode kajian artikel konseptual, penelitian ini dapat menyajikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerusuhan Mei 1998 di Indonesia dan memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman konsep-konsep terkait dalam konteks tersebut.

1. Rumusan Masalah
 - a. Apa Penyebab Utama Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia?
 - b. Apa dampak dari terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998?
 - c. Bagaimana respon pemerintahan dan komunitas internasional mengenai peristiwa kerusuhan Mei 1998?
 - d. Apa penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah peristiwa ini terulang kembali?
2. Tujuan
 - a. Memahami Akar Penyebab: Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kompleks yang menjadi akar penyebab kerusuhan Mei 1998;
 - b. Mendalami Dampak Sosial dan Ekonomi: Untuk mengukur dan menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kerusuhan Mei 1998, termasuk kerugian ekonomi dan dampaknya terhadap komunitas-komunitas tertentu;
 - c. Mempelajari Perubahan Politik: Untuk menyelidiki peran kerusuhan ini dalam proses transisi politik menuju era reformasi dan demokrasi di Indonesia serta memahami perubahan politik yang terkait;
 - d. Menilai Respons Pemerintah: Untuk mengevaluasi respons pemerintah Indonesia selama dan setelah kerusuhan, termasuk tindakan yang diambil untuk mengatasi situasi;
 - e. Mengidentifikasi Pembelajaran: Untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik dari Kerusuhan Mei 1998 dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik sosial di masa depan;

- f. Memberikan Wawasan Mendalam: Untuk memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas peristiwa ini, memahami dampaknya yang berkelanjutan, serta mengevaluasi implikasi pentingnya dalam sejarah dan perkembangan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerusuhan Mei 1998 terjadi bukan tanpa alasan. Banyak faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang membelakangi terjadinya kerusuhan Mei 1998. Faktor-faktor yang dimaksud akan dibahas pada seksi berikut ini.

1. Faktor Internal

- a. Krisis Ekonomi Indonesia. Krisis moneter 1998, yang sering disebut sebagai Krisis Finansial Asia 1997-1998, adalah krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara di Asia, termasuk Indonesia, pada akhir tahun 1990-an. Beberapa karakteristik dan faktor penting terkait dengan krisis moneter 1998 adalah:
- 1) Pelemahan nilai tukar mata uang: Salah satu ciri utama krisis ini adalah penurunan tajam nilai tukar mata uang negara-negara Asia terhadap dolar AS. Di Indonesia, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang signifikan;
 - 2) Kebangkrutan sektor keuangan: Banyak lembaga keuangan dan perbankan di negara-negara yang terkena dampak mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Hal ini menciptakan kepanikan di sektor keuangan dan merusak kepercayaan masyarakat;
 - 3) Penurunan investasi asing: Krisis ini mengakibatkan penarikan besar-besaran modal asing dari negara-negara Asia. Investor asing khawatir tentang stabilitas ekonomi dan finansial, yang mengakibatkan penurunan investasi asing yang signifikan;
 - 4) Inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi: Krisis moneter berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Masyarakat merasa terbebani oleh biaya hidup yang meningkat;
 - 5) Program bantuan internasional: Untuk mengatasi krisis ini, banyak negara Asia, termasuk Indonesia, harus mencari bantuan ke lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Dalam pertukaran bantuan finansial, negara-negara ini diharuskan menerapkan reformasi ekonomi dan kebijakan struktural;
 - 6) Ketidakstabilan sosial dan politik: Krisis moneter memicu ketidakstabilan sosial dan politik di beberapa negara. Unjuk rasa dan kerusuhan seringkali terjadi sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang menyakitkan. Di Indonesia, krisis moneter 1998 berkontribusi besar terhadap terjadinya kerusuhan Mei 1998. Krisis ini menciptakan ketidakpastian ekonomi dan sosial yang menyebabkan kemarahan dan protes di kalangan masyarakat. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah-langkah drastis, termasuk mengumumkan reformasi ekonomi dan politik, serta mencari bantuan dari IMF untuk menstabilkan situasi.
- b. Sentimen Etnis. Banyak warga keturunan Tionghoa di Indonesia memiliki usaha dan bisnis yang cukup sukses, sehingga dalam beberapa kasus mereka dianggap sebagai pemilik modal utama. Hal ini menciptakan persepsi bahwa warga keturunan Tionghoa memiliki kendali yang besar atas perekonomian. Stereotip negatif dan prasangka terhadap warga keturunan Tionghoa telah ada dalam masyarakat Indonesia selama beberapa decade. Stereotip semacam itu dapat memperburuk hubungan antar etnis dan merangsang tindakan kekerasan dan kebencian. Banyak toko dan properti yang dimiliki warga keturunan Tionghoa dijarah dan dirusak. Insiden pemerkosaan terhadap warga keturunan Tionghoa juga yang memicu kemarahan dan aksi balasan. Retorika politik yang

didasarkan pada identitas etnis sering kali digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap kelompok etnis lain. Propaganda semacam ini juga bisa memicu ketegangan dan konflik.

- c. Pemerintah yang Gagal dalam Menangani Permasalahan. Beberapa faktor ini bersama-sama berkontribusi dalam gagalnya pemerintah dalam menangani permasalahan pada Mei 1998. Akhirnya, tekanan dari demonstrasi dan unjuk rasa yang meluas memaksa turunnya Soeharto dari posisi Presiden pada bulan Mei 1998, membuka jalan bagi transisi politik yang lebih demokratis di Indonesia, yang meliputi:

- 1) Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 memicu peningkatan pengangguran, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah kesulitan mengatasi masalah ini, sehingga meningkatkan ketegangan sosial;
- 2) Ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto telah membangun selama bertahun-tahun. Keinginan untuk reformasi politik dan ekonomi semakin kuat, dan pemerintah tidak mampu merespons secara efektif;
- 3) Ketidaksetaraan ekonomi dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi menjadi masalah serius. Banyak orang merasa bahwa pemerintah tidak cukup berusaha untuk mengatasi masalah ini;
- 4) Ketidakmampuan aparat mengendalikan kerusuhan dan melindungi warga sipil membuat situasi semakin buruk. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia selama peristiwa ini.

2. Faktor Eksternal

- a. Kondisi Ekonomi Dalam Lingkup Global. Krisis Asia Timur meluas ke hampir belasan negara di seluruh dunia. Semuanya dimulai pada 2 Juli 1997, ketika Thailand mengumumkan bahwa mereka tidak mampu untuk melunasi utang internasional mereka. Berdasarkan negara-negara yang terdampak, terutama Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, para peneliti mengkategorikan penanganan yang kurang baik terhadap krisis ini. Melihat kemajuan besar yang telah diraih oleh Macan Asia Timur pada tahun 1980-an dan 1990-an, krisis Asia ini tampaknya sangat tidak terduga. Karakteristik-karakteristik Macan Asia Timur mendorong tindakan yang mengakibatkan penilaian yang terlalu tinggi terhadap mata uang mereka bersamaan dengan meningkatnya harga-harga domestik, termasuk pinjaman besar dalam mata uang asing, investasi spekulatif dalam real estat, dan koreksi mata uang terhadap dolar AS.
- b. Inteleferensi Asing. Ada spekulasi tentang kemungkinan intervensi asing dalam kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, tetapi penting untuk dicatat bahwa bukti konkret mengenai peran asing dalam peristiwa tersebut mungkin sulit ditemukan atau masih menjadi subjek perdebatan. Beberapa aspek yang telah disebutkan dalam konteks interfeferensi asing meliputi:
- 1) Konspirasi politik: Beberapa pihak telah mengklaim bahwa ada upaya luar negeri untuk menggoyang stabilitas politik Indonesia dengan tujuan tertentu.
 - 2) Dukungan finansial: Ada laporan tentang aliran dana dari luar negeri kepada kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang mungkin memiliki agenda tertentu dalam menciptakan atau memperkeruh kerusuhan.
 - 3) Media dan propaganda asing: Beberapa laporan juga mencatat peran media internasional dan propaganda asing dalam melaporkan atau memperkeruh situasi.

Beberapa penanganan pun telah dicoba untuk dilakukan untuk menangani konflik rasial antara Etnis Tionghoa dengan Pribumi ini. Dimana penanganan ini tebagi menjadi tiga poin besar yang akan dijabarkan di bawah ini.

1. Peran Angkatan Darat(TNI AD), Angkatan Udara(TNI AU), Angkatan Laut(TNI AL), dan kepolisian yang masih tergabung sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia(ABRI). Kerusuhan rasial di Surakarta pada tahun 1972, 1980, dan 1998 memerlukan respons besar dari TNI dan Kepolisian, dengan penggunaan tindakan represif untuk mengendalikan situasi yang terjadi dalam skala yang berbeda.
2. Peran Pemerintah. Pemerintah, baik kota maupun provinsi, memiliki peran penting dalam meredakan ketakutan masyarakat. Mereka turun ke lapangan untuk memberikan himbauan agar tidak terpengaruh oleh isu yang belum terkonfirmasi. Konsekuensi bagi yang terbukti bersalah ditegaskan.
3. Peran Organisasi. Organisasi seperti KNPI, AMPI, dan SMPR menunjukkan dukungan moral dan solidaritas dalam menangani kerusuhan. Mereka mengecam kekerasan serta menolak hubungan antara kerusuhan dan tuntutan reformasi mahasiswa, berperan dalam meredakan ketegangan dan mendukung penyelesaian situasi.

Pembahasan

Keterangan Waktu	Peristiwa
22 Januari 1998	Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya.
5 Maret 1998	Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional 10 Maret Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan Presiden lima tahun yang ketujuh kali dengan menggandeng BJ Habibie sebagai Wakil Presiden 14 Maret Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII dan Mahiswapun melakukan unjuk rasa.
15 April 1998	Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus.
1 Mei 1998	Soeharto melalui Mendagri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi disikapi dengan represif oleh aparat & terjadi bentrokan.
4 Mei	Harga BBM melonjak tajam hingga 71%, disusul tiga hari kerusuhan di Medan Dengan korban 6 meninggal. 7 Mei Peristiwa Cimanggis, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanggis. Dua di antaranya mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan & iritasi mata akibat gas air mata.
8 Mei 1998	Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh Mei 1998 Soeharto berangkat seminggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G-15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.
12 Mei 1998	Tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Trisakti terbunuh.
14 Mei 1998	Demonstrasi terus bertambah besar hampir di semua kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah.
15 Mei 1998	Indonesia selesai mengikuti KTT G-15. Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendarat di lapangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma.
18 Mei 1998	Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.
21 Mei 1998	Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan kemudian melantik BJ Habibie sebagai Presiden.
22 Mei 1998.	BJ Habible mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi" Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.
23 Juli 1998	Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di bentuk oleh Presiden BJ Habibie.
23 Agustus 1998	TPGF menyampaikan bahwa ada indikasi terjadinya Pelanggaran HAM berat pada peristiwa Mei 98 dan memberi rekomendasi untuk Komnas HAM melakukan penyelidikan.

Oktober 1998	Masa tugas Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) berakhir.
November 2002	Komnas HAM membentuk tim pengkajian laporan TPGF.
3 Februari 2003	Komnas HAM membentuk tim Ad Hoc penyelidikan untuk kasus pelanggaran HAM peristiwa Mei 1998 untuk menindaklanjuti rekomendasi tim pengkajia TPGF.
6 Maret 2003	Komnas HAM membentuk tim Pro Justica penyelidikan untuk kasus pelanggaran HAM peristiwa Mei 98.
5 September 2003	Tim Pro Justica melaporkan bahwa Peristiwa Mei 98 telah terjadi pelanggaran HAM berat dan merekomendasikan Komnas HAM untuk menyelidiki hasil penyelidikan ke Kejaksaan.
5 September 2003	Tim Pro Justica melaporkan bahwa Peristiwa Mei 98 telah terjadi pelanggaran HAM berat dan merekomendasikan Komnas HAM untuk menyelidiki hasil penyelidikan ke Kejaksaan.
2005	Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil laporan penyelidikan peristiwa Mei 98 ke Kejaksaan namun tidak ada tindak lanjut.
18 Mei 2014	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menghadiri kegiatan peletakan batu pertama Monumen Tragedi 1998 di Tempat Pemakaman Umum Pondok Rangun, Jakarta Timur.
13 Mei 2015	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, meresmikan Monumen Tragedi 1998 di Tempat Pemakaman Umum Pondok Rangun Jakarta Timur.

Kerusuhan Mei 1998 tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Terdapat proses panjang di belakang layar sedemikian sehingga tragedi ini bisa pecah. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, penyebab terjadinya peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dapat dibagi menjadi 3 poin besar.

1. Kegagalan pemerintah dalam menangani situasi yang memanas;
2. Adanya sentimen tertentu terhadap Kaum Tionghoa;
3. Interferensi asing yang memasuki Indonesia dalam berbagai macam aspek.

Mengkaji ketiga poin diatas membawa kita pada sebuah penanganan dimana dengan adanya aksi tertentu diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang lagi.

1. Pendidikan multikulturalisme pada tingkat formal dan nonformal penting untuk menanamkan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman budaya sejak dini, memperkuat persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Fokus pada asimilasi yang sukarela, menolak tindakan integrasi paksa, serta menguatkan konsep integrasi ke-Tionghoa-an yang sejajar dengan suku lain di Indonesia.
3. Penguatan negara di bidang ekonomi. Salah satu faktor yang serta-merta menjadi alasan utama kerusuhan terjadi adalah menurunnya kemakmuran masyarakat;
4. Pengkajian penanggulangan terhadap permasalahan ekonomi global;
5. Penguatan internal dan eksternal pemerintah serta memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

KESIMPULAN

Sejak kedatangan masyarakat minoritas etnis Cina ke Indonesia pada 1293, usaha pemerintah dalam program asimilasi untuk menyatukan etnis tersebut dengan masyarakat pribumi ternyata tidak berhasil, mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan eksklusivisme yang memicu prasangka negatif dan kekerasan, mencapai puncaknya dalam kerusuhan Mei 1998 setelah krisis ekonomi. Kurangnya responsif pemerintah terhadap krisis tersebut dan provokasi dari pihak-pihak tertentu memperburuk situasi, mengarah pada penyalahgunaan terhadap etnis Cina. Untuk mencegah hal serupa, pemerintah perlu bersikap netral dengan memberikan kesempatan yang sama pada etnis Cina di berbagai bidang, memastikan kesetaraan dalam segala urusan, dan memperbaiki sistem pemerintahan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Pendidikan juga perlu mempromosikan solidaritas sosial,

menghapus perbedaan antar kelompok, dan menghargai pluralitas. Melalui kebijakan ekonomi yang inklusif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta penjelasan transparan tentang kontribusi etnis Cina pada negara, prasangka negatif dapat diatasi untuk menciptakan harmoni sosial yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2009). Review of The Idea of Indonesia: A History. https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/54471/INDO_87_0_124118929_1_117_122.pdf?sequence=1
- Coppel, C. A. (1983). Indonesian Chinese in crisis. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794968838144>
- Hadiz, V. R. (2005). Social science and power in Indonesia. Equinox Publishing.
- Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the may 1998 riots in Indonesia: Civilians and their untold memories. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 240-257. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/18681034221084320>
- Nurmalaningrum, R. W. (2018). Lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. <https://osf.io/preprints/inarxiv/hn87j/>
- Purdey, J. (2002). Anti-Chinese violence in Indonesia, 1996-1999. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271573052544>
- Raditya, A., & Millah, A. S. (2009). Tafsir Konflik Kekerasan: Mengurai Ketegangan Sosial, Menuju Negeri Yang Damai. Kaukaba Dipantara. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ENWsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=TAFSIR+KONFLIK+KEKERASAN:+Mengurai+Ketegangan+Sosial,+Menuju+Negeri+Yang+Damai&ots=W3KD3cKa0e&sig=UY_8pQxioLL9rLvHWaNY7pCHCMk
- Rahman, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(3), 139-150. <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/view/211/225>
- Rhamadani, R. D. (2015). Peran Association Internationale Des Étudiants En Sciences Économiques Et Commerciales (Aiesec) Sebagai Aktor Non Negara Dalam Meminimalisir Dampak Isu Rasial Pada Masyarakat Cina Terhadap Indonesia Pasca Kerusuhan Mei 1998. *Global and Policy Journal of International Relations*, 3(01). <http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/1959>
- Rustamana, H. A., Adillah, P. M., & Zatusia, Z. (2023). 1998 Reform Movement. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 2(6), 543-562. <https://doi.org/10.55927/esa.v2i6.6880>
- Rustopo. 2007. Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895-1998. Yogyakarta: Ombak.
- Saputri, N. (2023). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal PUSDANSI*, 2(2). <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/75>
- Setiono, Benny. G. 2002. Tionghoa Dalam Pusaran Politik. Jakarta: Elkasa.
- Siswoyo, Bambang. 1981. Huru-Hara Solo Semarang: Suatu Reportase. Jakarta. Bhakti Pertiwi.
- Supriyanto, S. (2022). Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 66-74. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i2.15>
- Tarmidi, L. T. (1999). Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF dan saran. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1(4), 1-25. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.183>
- Wasino. 2006. Wong Jawa dan Wong Cina : Lika-Liku Hubungan Sosial antara Etnis Tionghoa dengan Jawa di Solo tahun 1911-1998. Semarang: UNNES Press